

**SINERGITAS PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Bunga Fata Faiza
NPP. 29.0875

*Asdaf Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: bungafata14@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Increasing the spread and birth of new variants of the COVID-19 virus and becoming wider and covering all sectors of basic community life from this research. The ability of the community's immune system to fight infectious viruses (immunity) needs to be improved, especially for people with disabilities. So far, the implementation is still facing obstacles despite the issuance of a circular by the Indonesian Ministry of Health. Stakeholders in Sleman District are trying to overcome this. **Objective:** This study aims to analyze the synergy of implementing COVID-19 vaccination for Persons with Disabilities in Sleman Regency. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data was collected by using interview, observation, and documentation techniques. The data analysis technique uses the stages of data reduction, data presentation, and verification. **Results/Findings:** The results of the research and analysis show that the synergy between academia, business, community, government, and media has succeeded in realizing the acceleration of vaccination for persons with disabilities. The synergy that has been built has proven to give birth to greater strength. However, there are still obstacles that need to be solved, so that in the future the results obtained will increase. Stakeholders involved in the implementation of the acceleration of disability vaccination in Sleman Regency should make a written commitment to be accountable and legal before the law. Then, vaccination activities should be carefully planned from a long time ago so that future activities can run better. **Conclusion:** The synergy carried out by all actors in the implementation of COVID-19 vaccination for persons with disabilities in Sleman Regency in an effort to realize immunity can be said to be successful. This can be seen, because people with disabilities say that they feel helped by the facilities provided by the stakeholders.

Keywords: *COVID-19, Vaccination, Difabel, Synergy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peningkatan penyebaran dan lahirnya varian baru virus COVID-19 serta dampaknya yang luas dan meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat menjadi dasar dari penelitian ini. Kemampuan kekebalan tubuh masyarakat dalam melawan virus menular (imunitas) perlu ditingkatkan, terlebih bagi penyandang disabilitas. Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi

masih menemui kendala meski telah dikeluarkan surat edaran oleh Kementerian Kesehatan RI. Para *stakeholders* di Kabupaten Sleman mencoba mengatasinya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa sinergi yang terjadi antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media sudah berhasil mewujudkan giat percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas. Sinergi yang dibangun terbukti melahirkan kekuatan yang lebih besar. Walau demikian masih terdapat kendala yang perlu dipecahkan solusinya, sehingga kedepan hasil yang didapat meningkat. Stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi disabilitas di Kabupaten Sleman seharusnya membuat komitmen secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan dan legal di hadapan hukum. Kemudian, kegiatan vaksinasi sebaiknya disusun perencanaannya secara matang dari jauh-jauh hari agar kegiatan di waktu mendatang dapat berjalan lebih baik. **Kesimpulan:** Sinergi yang dilakukan seluruh aktor dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman dalam upaya mewujudkan imunitas dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat diketahui, sebab penyandang disabilitas menyampaikan bahwa mereka merasa terbantu oleh kemudahan yang disediakan para *stakeholders*.

Kata kunci: COVID-19, Vaksinasi, Difabel, Sinergi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi problematika pelik yang dihadapi masyarakat global sejak akhir tahun 2019 silam. Penyebaran coronavirus yang menginfeksi saluran pernapasan manusia ini terjadi dengan mudah dan cepat. Seseorang dapat tertular hanya dengan menyentuh benda-benda atau permukaan sekitar yang terkena percikan- percikan dari hidung atau mulut pasien COVID-19. Kasus COVID-19 dikonfirmasi masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam perkembangannya, penyebaran virus ini cenderung meningkat. Mahardika, Anggota Tim Pakar Medis Satgas COVID-19, pada laman covid19.go.id menyatakan bahwa virus ini mudah berubah, mengalami mutasi, dan melahirkan varian baru. Ada dua jenis yang menjadi fokus, yakni varian Alfa (B.1.1.7) dan Delta (B.1.617). Masuknya varian virus corona baru di Indonesia menandakan bahwa upaya penanganan terhadap wabah harus terus berlanjut.

Vaksinasi akhirnya dijadikan *game changer* oleh pemerintah untuk mewujudkan herd immunity atau kekebalan komunal. Vaksin disebut sebagai cara paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular (Makmum & Hazhiyah, 2020). Pelaksanaan vaksinasi ditargetkan selesai dalam jangka waktu 15 bulan oleh Kementerian Kesehatan RI, sehingga akan berlangsung selama dua periode. Pelaksanaan vaksinasi kemudian dilanjutkan ke Tahap III yang diperuntukkan bagi masyarakat kelompok rentan dan masyarakat umum lainnya sesuai dengan Surat Edaran HK.02.02/I/1727/2021 Tentang Vaksinasi Tahap 3 Bagi Masyarakat Rentan Serta Masyarakat Umum Lainnya dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Anak Usia 12-17 Tahun.

Pemberlakuan Vaksinasi Tahap 3 ini berlaku di seluruh daerah di Indonesia termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman. Bedasar data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman, diketahui jumlah sebaran masyarakat rentan khususnya penyandang disabilitas mencapai

angka 7.483 orang. Namun, berdasar data Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman total keseluruhan penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman yang tervaksin baru mencapai 432 orang. Jumlah ini masih jauh dari total penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sleman sehingga perlu mendapat perhatian lebih.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 62 Ayat (3) Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika seseorang dengan disabilitas yang membutuhkan kehadiran orang lain baik dalam proses perawatan maupun pendampingan terpapar virus COVID-19, maka pemberlakuan jarak sosial atau isolasi mandiri cukup sulit diwujudkan.

Pemerintah Kabupaten Sleman, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan berbagai pihak yang terlibat memiliki peran esensial terhadap pelaksanaan Vaksinasi Tahap III secara umum dan secara khusus bagi penyandang disabilitas. Untuk menemukan jalan keluar atas beragam permasalahan yang menyangkut kewenangan dan tanggungjawab dari banyak pihak serta agar memperoleh hasil yang maksimal maka dilakukan sinergi atau kerjasama dengan berbagai pihak antara lain dengan melibatkan para *stakeholders penta helix*.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas dalam mewujudkan kekebalan komunal. Peningkatan kecepatan transisi, keparahan, hingga kemampuan dalam mengelabui imunitas inangnya mengakibatkan munculnya kekhawatiran yang cukup besar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Sehingga, penanganan COVID-19 yang melibatkan aktor ABCGM (*academician, business, community, government, and Media*) diharapkan mampu membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Keterlibatan aktor non-pemerintah dalam upaya penanganan peningkatan keparahan virus COVID-19 diharapkan mampu bekerja secara efektif guna mencapai tujuan. Berbagai faktor penghambat yang ditemukan memerlukan upaya yang tepat dalam menanggulungannya. Adapun tujuan dari keterlibatan *stakeholders* ABCGM dalam penanganan COVID-19 yaitu, sebagai upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama menganalisis proses sinergi dalam mencapai suatu tujuan dengan menggunakan teori *penta helix*. Penelitian yang dilakukan oleh Muhyi dan kawan-kawan yang berjudul *The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City* (2017), menemukan bahwa terjadi permasalahan dalam hubungan bersinergi antar *stakeholders* seperti kurangnya koordinasi dan kurangnya komitmen sehingga mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurulwahida dengan judul *Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan Model Penta Helix dalam Pengembangan Wisata Heritage Kajoetangan di Kota Malang* (2019), mengemukakan bahwa perlunya diketahui proses kolaborasi dan faktor apa saja yang dilandasi dalam tata Kelola pemerintah model *penta helix* dalam pengembangan Wisata Heritage Kajoetangan Kota Malang. Penelitian yang dilakukan oleh Novy Setia Yunas yang berjudul *Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur* (2019) menemukan bahwa perwujudan model pengembangan potensi desa tersebut harus diwujudkan secara sinergis dengan seluruh pihak, khususnya dalam bentuk kolaborasi *penta helix*. Dalam penelitian

tersebut dikemukakan pula bahwa kemitraan berhasil dibangun sesuai tupoksi yang ada dengan menghilangkan ego sektoral diantara masing-masing sektor.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni sinergitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan menggunakan model pendekatan induktif dimana peneliti mengumpulkan seluruh fakta di lapangan yang berasal dari hasil observasi, wawancara, catatan, dokumen resmi maupun dokumen pribadi, yang berhubungan dengan permasalahan dan lokasi penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Objek penelitian yang difokuskan berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni fokus kepada proses sinergi yang dilakukan pemerintah setempat Bersama empat aktor *penta helix* lainnya yaitu media, akademisi, komunitas, dan bisnis, dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, berupa pelayanan kesehatan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi yang terjadi antar aktor ABCGM dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID-19 pada penyandang disabilitas; untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam sinergitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada penyandang disabilitas, dan menganalisis upaya dalam meningkatkan sinergitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan secara induktif, dimana peneliti mengamati fenomena atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yaitu melakukan wawancara mendalam dengan 7 informan yang terdiri dari Pengelola Program Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (unsur pemerintah), Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman (unsur pemerintah), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman (unsur pemerintah), Ketua PPDI Kabupaten Sleman (unsur komunitas), Tribun Jogja (unsur media), Kepala SLB N 1 Sleman (unsur akademisi), dan Ketua Koordinator Vaksinasi Massal serta Bagian Hukum dan *Relation Government Sleman City Hall* (unsur bisnis). Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggambarkan dan menganalisis secara berurutan permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga mendapatkan interpretasi berupa gambaran masalah dan hubungan antar fenomena sehingga disimpulkan untuk memecahkan masalah terkait sinergitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/I/1727/2021/Tentang Vaksinasi Tahap 3, percepatan kegiatan vaksinasi ini dilakukan guna mencapai herd immunity dan mengurangi dampak akibat virus COVID-19 serta mencegah paparan virus, mengingat maraknya varian virus baru yang muncul. Dalam upaya menuntaskan dua dosis vaksinasi pada masyarakat rentan ini, pihak-pihak yang terkait perlu memperkuat upaya komunikasi dan sosialisasi dalam rangka percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas serta mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi khusus yang sesuai dengan situasi daerah masing-masing dalam meningkatkan jangkauan bagi penyandang

disabilitas. Konsep penta helix merupakan model kolaborasi sinergis dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media yang dicetuskan guna mencapai satu visi yang sama, dalam hal ini pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

A. Sinergitas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman

Sinergitas merupakan perwujudan dari sebuah kekuatan besar dimana berbagai pihak saling menopang untuk mewujudkan satu visi yang sama. Sinergitas model *penta helix* diyakini sebagai terobosan baru dalam melakukan penyelesaian pada masalah-masalah yang kompleks sebab melibatkan lima aktor dengan bidang dan peran yang berbeda. Dalam penelitian ini proses sinergi yang terjadi antar aktor *penta helix* dalam percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman akan diungkap dan dianalisis dalam beberapa variabel yang dikemukakan oleh Mohr dan Spekman (1994) dalam (Muhyi, et al.2017) yaitu atribut, perilaku komunikasi, dan teknik resolusi konflik.

1. Atribut

Atribut dalam sinergitas penta helix terdiri dari beberapa indikator yaitu komitmen, koordinasi, kepercayaan, kekuatan, dan saling ketergantungan. Artinya kelima indikator tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dalam proses bersinergi. Lima indikator harus dipenuhi oleh masing-masing aktor. Berdasar hasil pemetaan yang dilakukan peneliti, dapat dilihat bahwa setiap aktor yang terlibat dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman memiliki tugas pokok dan fungsi atau perannya masing-masing. Dalam bersinergi setiap dari mereka memiliki keududukan yang sama. Artinya satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung. Berdasar hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan aktor ABCGM koordinasi menjadi indikator paling dominan yang dimiliki aktor *penta helix*.

Berdasar keterangan dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman, jumlah penyandang disabilitas yang sudah melakukan vaksinasi adalah sebanyak 80% dengan 20% penyandang disabilitas yang belum melaksanakan vaksin adalah mereka yang berkomorbid dan mereka yang tidak mendapatkan rekomendasi (tidak diperbolehkan melakukan vaksin) oleh dokter.

Selanjutnya, untuk dapat berjalan sejauh itu tiap aktor yang terlibat memiliki komitmen satu sama lain sehingga. Kemitraan ini juga dibangun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dengan upaya masing-masing aktor untuk menghilangkan ego sektoral diantara masing-masing sektor. Meskipun tidak semua komitmen para aktor ABCGM ini diwujudkan secara resmi atau tertulis, namun pada kenyataannya kegiatan percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman secara umum berjalan dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan vaksinasi ini, namun berkat adanya komitmen, koordinasi, saling ketergantungan, dan rasa kepercayaan yang tinggi, pada kesempatan-kesempatan selanjutnya, pelaksanaan kegiatan vaksinasi berjalan lebih cepat.

2. Perilaku Komunikasi

Dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, para aktor penta helix melakukan komunikasi dua arah dengan berbagai bentuk, yaitu formal, non-formal, langsung, dan tidak langsung. Salah satu bentuk komunikasi formal yang diwujudkan adalah rapat internal panitia penyelenggara kegiatan vaksinasi yang terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, dan pemerintah yang dilakukan sebelum kegiatan

berlangsung. Selanjutnya, untuk pihak media dihubungi oleh pihak dinas selaku pemerintah untuk melakukan publikasi ke media sosial guna menyukseskan kegiatan vaksinasi. Aktor akademisi dalam hal ini adalah para guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) selain melakukan komunikasi formal dengan pihak ABCGM lainnya, mereka juga menajalin komunikasi dengan para penyandang disabilitas, yaitu sebagai edukator terkait pentingnya vaksinasi. Secara daring mereka memberikan edukasi rutin kepada anak dengan disabilitas di Kabupaten Sleman berikut dengan kedua orang tuanya.

Pihak bisnis yaitu Manajemen Sleman City Hall melakukan komunikasi langsung dengan Dinas Kesehatan terkait jadwal pelaksanaan vaksin. Menurut keterangan dari Bapak Devilito, tidak jarang pihak dinas memberikan informasi yang mendadak kepada pihak SCH terkait pelaksanaan vasinasi. Namun, berdasar keterangan beliau hal ini terjadi pada kesempatan ke dua dan seterusnya sehingga tidak mempengaruhi performa mereka dalam memberikan fasilitas serta pelayanan vaksin. Komunitas yang digandeng Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Wilayah Kabupaten Sleman. PPDI ini merupakan organisasi resmi yang berada di bawah pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaannya di lapangan, Dinas Kesehatan akan meminta data disabilitas kepada pihak yang membinanya yaitu Dinas Sosial. Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial kemudian memberikan data yang telah dikumpulkan bersama-sama dengan PPDI.

Dinas sosial tak hanya memberikan data disabilitas kepada Dinas Kesehatan namun juga sebagai perantara antara Dinas Kesehatan dan masyarakat disabilitas dalam hal ini adalah penyaluran informasi terkait kegiatan percepatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Dalam penyaluran informasi, Dinas Sosial menggunakan media non-formal dan memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu whatsapp grup serta komunitas-komunitas yang dekat dengan para penyandang disabilitas. Hal ini dapat disebut sebagai langkah yang efektif dan efisien dalam menyalurkan informasi.

3. Teknik Resolusi Konflik

Sebuah kegiatan maupun tujuan yang melibatkan banyak pihak pasti tidak menutup kemungkinan akan memunculkan berbagai permasalahan yang terduga maupun yang tidak terduga. Begitupun dengan kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman ini juga menemui berbagai kendala. Dalam upaya percepatan vaksiansi disabilitas yang telah dilakukan tersebut nyatanya terdapat kendala di lapangan berupa sulitnya penyandang disabilitas melakukan mobilisasi secara mandiri dari kediamannya menuju sentra vaksin. Oleh karenanya, Dinas Sosial memberikan solusi terkait angkutan dan mobilisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

Permasalahan lain yang terjadi dalam proses sinergitas pelaksanaan vaksinasi disabilitas ini adalah ketakutan penyandang disabilitas untuk melaksanakan vaksin, terlebih disabilitas yang masih berada pada usia produktif. Selain ketakutan dari diri mereka sendiri, banyak pula ketakutan muncul dari pihak keluarga. Untuk mengatasi permasalahan ini, tenaga pendidik mengerahkan kemampuannya dalam mengedukasi difabel. Mereka mencoba memberikan pemahaman melalui kalimat-kalimat dan metode-metode yang mudah dipahami.

Terakhir, kendala yang saat ini dihadapi oleh para aktor penta helix khususnya bagi Dinas Sosial adalah tidak adanya rekap data difabel yang telah melaksanakan vaksin. Tidak diketahuinya jumlah difabel yang sudah melakukan vaksin disebabkan karena setelah pelaksanaan vaksin input data hanya dilakukan langsung di peduli lindungi. Bahkan Dinas

Kesehatan sebagai penyelenggara utama kegiatan vaksinasi tidak lagi dapat mengakses dan mengelompokkan data tersebut. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi Dinas Sosial juga Dinas Kesehatan untuk melakukan filter dan pemberian vaksinasi lanjutan dosis ke tiga. Selain itu, saat ini dinas tidak dapat mengetahui siapa yang belum melakukan vaksin beserta alasannya. Sementara ini, solusi yang dipilih Dinas Sosial adalah mendata ulang, door to door untuk memastikan data valid vaksinasi disabilitas.

B. Faktor Penghambat

Pelaksanaan kolaborasi dalam proses percepatan kegiatan vaksinasi disabilitas di Kabutapen Sleman dapat dikatakan memuaskan. Sebab, seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Ibu Laminem, SH. dalam wawancaranya bahwa ketercapaian kegiatan vaksinasi sudah mencapai 80%. Beliau juga menjelaskan bahwa 20% penyandang disabilitas yang belum mendapatkan fasilitas vaksin atau imunisasi adalah mereka yang memiliki komorbid, tidak mendapat rekomendasi dari dokter, dan jenis-jenis disabilitas tertentu

Keberhasilan yang dicapai selama pelaksanaan kegiatan ini nyatanya tak luput dari hambatan. Salah satu hal dasar yang menjadi hambatan adalah terkait bentuk komitmen yang dibangun dalam proses kolaborasi. Hampir seluruh pihak (aktor) yang terlibat mengungkapkan bahwa tidak ada bentuk komitmen legal di atas kertas yang dilakukan sebelum pelaksanaan kolaborasi.

Faktor penghambat lainnya yang menyebabkan kegiatan percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas tidak maksimal terletak pada beberapa agenda vaksin yang mendadak. Mendadak dalam hal ini adalah penyampaian informasi dan permohonan kolaborasi dengan pihak lain yang terlalu dekat dengan tanggal pelaksanaan vaksin. Sebagai contoh, hal ini pernah terjadi pada vaksinasi disabilitas yang oleh Dinas Kesehatan yang mendapat permohonan dari PKK Kabupaten Sleman untuk dapat melaksanakan kegiatan vaksinasi di Pendhopo Bupati Sleman. Menurut pengamatan peneliti, hal ini cenderung merujuk pada kepentingan salah satu kelompok dengan mengedepankan ego sektoral yang bertujuan untuk menciptakan suatu citra di kalangan masyarakat disabilitas diluar dari manfaat pemberian vaksinasi itu sendiri.

Contoh lainnya adalah pelaksanaan vaksinasi disabilitas yang dilakukan secara massal di Sleman City Hall. Bapak Devilito Megananda dalam wawancaranya dengan peneliti sempat menceritakan bahwa pihak Dinas Kesehatan pernah melakukan koordinasi secara non formal pada H-1 kegiatan vaksinasi, yaitu permohonan penyediaan fasilitas berupa tempat dan personil bantuan untuk kegiatan vaksin tersebut. Walaupun Bapak Devilito menjelaskan bahwa mereka dapat menyanggupi permohonan tersebut sebab sumber daya manusia dari Sleman City Hall sudah terlatih dalam eksekusi suatu kegiatan. Namun hal ini tentu saja harus diminimalisir, sebab kedepannya sangat mungkin jika tidak semua mitra sanggup melakukannya dengan baik bila informasi dan koordinasi dilakukan dalam rentang waktu yang terlewat singkat.

C. Upaya dalam Meningkatkan Sinergitas Pelaksanaan Vaksinasi Disabilitas

Identifikasi dari permasalahan yang muncul dalam kegiatan percepatan vaksinasi disabilitas di Kabupaten Sleman dapat dilakukan secara maksimal setelah kegiatan tersebut berlangsung. Hasil dari identifikasi masalah tersebut tentu tidak boleh berhenti sampai disitu saja. Perlu adanya konklusi atau penyelesaian dari permasalahan tersebut untuk memberikan peningkatan pelayanan dan pencapaian hasil yang lebih maksimal pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terkait dengan permasalahan atau faktor penghambat yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya maka peneliti memberikan solusi diantaranya adalah pembentukan prosedur yang sesuai dengan visi

misi, kemudian disahkan secara resmi agar dapat mengikat secara hukum seluruh komponen yang nantinya terlibat dalam proses kolaborasi. Prosedur dibuat dengan maksud agar para stakeholders atau aktor *penta helix* memiliki pedoman, rambu-rambu, maupun batasan dalam berkolaborasi. Solusi yang ditawarkan peneliti terkait hambatan yang berkaitan dengan manajemen waktu dalam berkoordinasi dan pendistribusian informasi adalah dengan membuat *timeline*. Penyusunan *timeline* ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan *platform* digital yang ada sehingga dapat mempermudah dalam pemantauan kegiatan.

Bila salah seorang aktor mengambil tindakan yang merugikan maupun menimbulkan masalah maka dapat segera ditangani. Pun sebaliknya, apabila salah satu aktor memiliki inovasi atau usulan baru yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman maka bisa segera ditampung dan difasilitasi. Pada era digital seperti ini, prosedur hitam di atas putih merupakan sesuatu yang penting, namun prosedur yang ada hendaknya tidak bersifat kaku dan eksklusif, sebab akan menghambat lahirnya inovasi dan ide-ide baru.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap 3, yaitu percepatan pemberian imunisasi bagi masyarakat rentan di Kabupaten Sleman yang dilaksanakan per 1 Juli 2021 lalu meliputi lansia, penyandang disabilitas, dan anak usia 12-17 tahun. Pelaksanaan percepatan vaksinasi ini melibatkan berbagai pihak di beragam bidang. Sinergi atau kerjasama memang dijadikan solusi dalam upaya memenuhi hak pemberian vaksinasi sebagai bentuk pelayanan kesehatan pada disabilitas. Sinergi juga dilakukan untuk memunculkan perubahan dan pengembangan guna menciptakan kondisi kerja yang lebih baik, khususnya pengambilan keputusan bagi kemaslahatan rakyat serta alat untuk menuntaskan *problem* pemerintahan. Peneliti menemukan temuan penting terkait sinergitas yang dilakukan aktor *penta helix* dalam proses percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, bahwa vaksinasi ini diselenggarakan bermula dari diajukannya permohonan oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang diprakarsai oleh ketua PPDI Sleman. Menurut penjelasan Ketua PPDI Sleman Bapak Sukamto, diketahui permohonan tersebut diajukan secara person to person sebab dalam daftar penerima vaksin bagi masyarakat rentan awalnya penyandang disabilitas tidak diikutsertakan. Akhirnya Bapak Sukamto melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan terkait hak penyandang disabilitas akan vaksin. Dalam penelitian sebelumnya, sinergitas *penta helix* tidak diprakarsai oleh unsur komunitas, melainkan pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa terkadang beberapa hal atau unsur penting terlewat dalam kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini ialah program percepatan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua bagi masyarakat rentan. Peran serta aktor-aktor lain sangat dibutuhkan untuk menopang keterbatasan yang dimiliki pemerintah ataupun aktor lainnya. Sinergitas pada kegiatan percepatan vaksinasi yang dimulai pada Agustus 2021 ini, menurut Dinas Sosial Kabupaten Sleman 80% penyandang disabilitas telah mendapatkan vaksin hingga dosis kedua.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sinergitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses sinergi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman secara umum berjalan dengan lancar. Namun demikian, ternyata penyandang disabilitas kesulitan melakukan mobilisasi mandiri dari kediamannya menuju sentra vaksin, sehingga Dinas Sosial memberikan fasilitas angkutan (mobil jemputan) untuk difabel, baik angkutan milik Dinas Sosial maupun milik pemerintah desa setempat.

2. Capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman telah mencapai angka 80%, namun sayangnya sejak awal proses kolaborasi tidak ada bentuk komitmen resmi yang dilakukan para stakeholders. Selain itu pendistribusian informasi yang diberikan aktor satu kepada aktor lainnya terlalu mendadak.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan proses sinergi dalam pelaksanaan vaksinasi bagi penyandang disabilitas adalah dengan mulai menyusun prosedur kerja dan merancang pembuatan timeline kegiatan bersama.

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah disebutkan diatas peneliti membuat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan antara lain sebelum kegiatan vaksinasi dilakukan hendaknya dinas sosial maupun dinas kesehatan memastikan kondisi difabel melalui formulir online pendaftaran yang biasanya digunakan, dengan menambah kolom pertanyaan berupa pilihan kebutuhan angkutan atau mobil jemputan. Kemudian, *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi disabilitas di Kabupaten Sleman seharusnya membuat komitmen secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan dan legal di hadapan hukum. Kemudian, kegiatan vaksinasi sebaiknya disusun perencanaannya secara matang dari jauh-jauh hari agar hasil yang diperoleh dapat mencapai maksimal. Terakhir, upaya atau solusi untuk meningkatkan kualitas proses sinergi antar aktor penta helix hendaknya diwujudkan agar kegiatan di waktu mendatang dapat berjalan lebih baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni, waktu dan biaya penelitian. Dimana waktu pelaksanaan penelitian yang sedikit mengakibatkan peneliti sulit mendapatkan momen tertentu untuk melakukan observasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada objek serupa yang berkaitan dengan Sinergitas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Penyandang Disabilitas, untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, SLB N 1 Sleman, Sleman City Hall, dan PPDI Sleman yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Covey, S. R. 2015. *7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif*. Jakarta: Dunamis Intra Sarana.
- Usman, H., & Setiadi Akbar, P. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Ismail, N., & Sri Hartati. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Surat Edaran No. HK.02.02/I/1727/2021/Tentang Vaksinasi Tahap 3 Bagi Masyarakat Rentan Serta Masyarakat Umum Lainnya dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Anak Usia 12-17 Tahun.
- Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2014 Pasal 6 huruf c Tentang Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 243/KEP/2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta
- Makmum & Haziyah. 2020. *“Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin COVID-19”*. Molucca Medica.
- Muhyi, H. A. dkk. *“The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City”*. Review of Intergarive Business & Economics Research.
- Mukhtaromi, dkk. 2012. *“Sinergi Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi Pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kabupaten Pasuruan)”*. Jurnal Administrasi Publik (JAP).
- Soemaryani., Imas. 2016. *“Pentahelix Model to Increase Tourist Visit to Bandung and Its Surrounding Areas Trough Huan Resource Development”*. Academy of Strategic Management Journal.
- Wahida, S., N. 2019. *“Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan Model Penta Helix Dalam Pengembangan Wisata Heritage Kajoetangan Di Kota Malang”*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yunas, N., S. 2019. *“Implementasi Konsep Penta Helix Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur”*. Jurnal Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan.
- Ahli : *“Cara Terbaik Cegah Penularan Covid-19 Dengan Hindari Kerumunan Dan Vaksinasi”*. Covid19.Go.Id, 2021 <<https://covid19.go.id/p/berita/ahli-cara-terbaik-cegah-penularan-covid-19-dengan-hindari-kerumunan-dan-vaksinasi>> [accessed 3 September 2021].
- Hakam, *“Paparasi Pakar Genetika UGM Tentang Dampak Varian Baru Covid-19”*. Ugm.Ac.Id, 2021 <<https://www.ugm.ac.id/id/berita/21203-paparasi-pakar-genetika-ugm-tentang-dampak-varian-baru-covid-19>> [accessed 3 September 2021]
- Maharani, Shinta, *“Cerita Nuning, Pejuang Vaksinasi Covid-19 Untuk Difabel Di Yogyakarta”*. Tempo.Co, 2021 <<https://nasional.tempo.co/amp/1495267/cerita-nuning-pejuang-vaksinasi-covid-19-untuk-difabel-di-yogyakarta>> [accessed 5 September 2021]
- “Vaksin Teruji Mampu Beri Perlindungan Terhadap Varian Baru”* Covid19.Go.Id, 2021 <<https://covid19.go.id/p/berita/vaksin-teruji-mampu-beri-perlindungan-terhadap-varian-baru>> [accessed 3 September 2021]
- Widiyanto, Aris, ‘Implementasi Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Dan Perlindungan’, 2016 <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/karya_perencanaan/detail/49-implementasi-jaminan-kesehatan-khusus-jamkesus-sebagai-salah-satu-upaya-pemenuhan-dan-perlindungan> [accessed 16 November 2021]